

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ananda, R. (2018). *Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan* (1st ed.). Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia.
- Darmawan, E., P, R. A., & Septian, D. (2017). *Kebijakan Sektor Publik*. UMRAH Press.
- Daryanto, & Farid, M. (2013). *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah* (T. Marjuki (ed.)). Gava Media.
- Fattah, N. (2014). *Analisis kebijakan publik* (3rd ed.). PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Hasbullah. (2006). *Otonomi Pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Kadir, A., Yulianto, E., Kurnianto, R., Fauzi, A., Baehaqi, Rosmiati, & Nu'man, A. (2012). *Dasar-dasar Pendidikan*. Kencana Prenadamedia Group.
- Kemendikbud. (2013). *Pengelolaan Pendidikan Menengah Sma Dan Smk*.
- Rosidin, U. (n.d.). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (2015th ed.). CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Usman, H., Setiady, P., & Akbar. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara.

Jurnal

- Elsavina, D. (2018). Alih Kelola Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi (Studi di Kota Blitar). *Ilmu Pemerintahan*, 168.
- Damayanti, S. N. (2017). Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Ilmu Administrasi Negara*, 5, 12.

- Ernadi, D. (2017). Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Jenjang Pendidikan SMA Sederajat Dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi. *Fakultas Hukum*, 1–47.
- Habibi, F. (2017). Transisi Peralihan Kewenangan Bidang Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Banten. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 5(2), 11–22.
- Harun, H. (2018). Penyelenggaraa Urusan Pemerintahan Daerah Studi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan Menengah Di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. *Dialektika*, 3, 33–54.
- Lubis, A. F. (2020). Tinjauan yuridis terhadap Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas di Sumatera Utara. *Fakultas Hukum*.
- Oktafiana, R., Fathiyani, & Musdalifah. (2020). Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Institut Agama Negeri Bone*, 3(3), 374–385.
- Panjaitan, D. A. T., Gutami, B., & Suhartoyo. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Bidang Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Ilmu Hukum*, 6, 1–19.
- Prasetyo, I. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi (Studi Kasus di Kota Blitar). *Filsafat Politik Islam*, 106.
- Satya, V. E. (2019). Analisis Pengalihan Aset SMA/SMK sebagai Dampak dari Pengalihan Pengelolaan Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan: Studi di Provinsi Banten. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 10(2), 77–90.
- Saputro, A., & Rahaju, T. (2017). Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten / Kota Ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi Di Kota Surabaya) Aric Saputro. *Ilmu Administrasi Negara*.
- Sofyan, Y., Ahmadi, E., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Pembiayaan Pendidikan (Suatu Kajian Praktis Dalam Pengeloaan Anggaran Pendidikan Di Sekolah Menengah Umum). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(1), 221–239.
- Yurine, D. E. (2018). Pelaksanaan Peralihan Kewenangan di Bidang Pendidikan SMA/SMK setelah Berlakunya UndangUndang Nomor 23. Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi di Provinsi NTB). *Fakultas Hukum*, 1(1), 1–15.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor.2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas.

